



**PENGARUH KINERJA KEUANGAN, UKURAN PERUSAHAAN,
STRUKTUR MODAL, DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN,
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI
BEI TAHUN 2021 –2023)**

SKRIPSI

**Oleh :
YUNITA ASRI
20210100026**

**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**

**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2025



**PENGARUH KINERJA KEUANGAN, UKURAN PERUSAHAAN,
STRUKTUR MODAL, DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN,
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI
BEI TAHUN 2021 –2023)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Oleh :
YUNITA ASRI
20210100026**

**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2025

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yunita Asri
NIM : 20210100026
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Pajak
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, Tata Kelola Perusahaan, terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2021 – 2023).

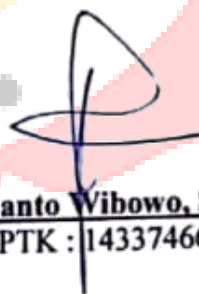
Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Menyetujui,
Pembimbing,

Tangerang, 02 Oktober 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Sutandi, S.E., M.Akt.
NUPTK : 5956756657130122


Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NUPTK : 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, Tata Kelola Perusahaan, terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2021 – 2023).

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Yunita Asri

NIM : 20210100026

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 02 Januari 2025

Menyetujui,

Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Sutandi, S.E., M.Akt.

NUPTK : 5956756657130122

Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.

NUPTK : 1438746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutandi, S.E., M.Akt

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Yunita Asri

NIM : 20210100026

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, Tata Kelola Perusahaan, terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2021 – 2023).

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,
Pembimbing,



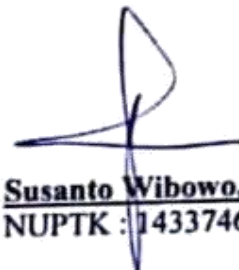
Sutandi, S.E., M.Akt.
NUPTK : 5956756657130122

Tangerang, 02 Januari 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NUPTK : 1433746647130352



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Yunita Asri
NIM : 20210100026
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, Tata Kelola Perusahaan, terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2021 – 2023).

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**DENGAN PUJIAN**” oleh Tim Penguji pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025.

Nama Penguji

Tanda Tangan

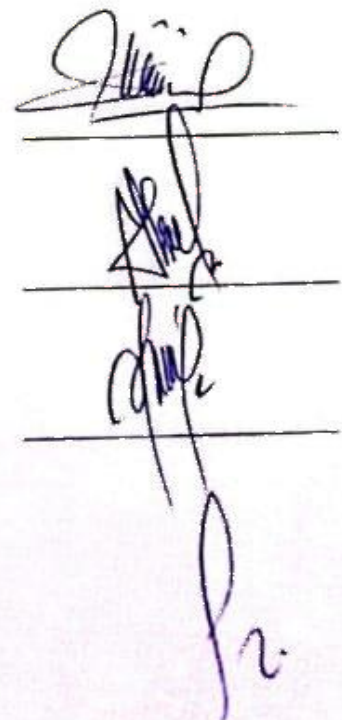
Ketua Penguji : Sabam Simbolon, S.E., M.M.
NUP : 9990066602

Penguji I : Rina Aprilyanti, S.E., M.Akt.
NUPTK : 4740764665230302

Penguji II : Rinintha Parameswari, S.Pd., M.Si.
NUPTK : 3535758659230153

Dekan Fakultas Bisnis,


Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NUPTK : 9759751652230072



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 19 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Yunita Asri

20210100026

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20210100026
Nama : Yunita Asri
Jenjang Studi : Strata I
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Struktur modal, dan Tata Kelola Perusahaan, Terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2021-2023)”** beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mangalih media atau *formation*, mengelola dalam pangkalan data media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pencipta/penulis karya ilmiah. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 12 Maret 2025

Penulis,



Yunita Asri

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN, UKURAN PERUSAHAAN,
STRUKTUR MODAL, DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN,
TERDAFTAR PENGHINDARAN PAJAK (PERUSAHAAN SEKTOR
PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2021 –2023)**

ABSTRAK

Penghindaran pajak dianggap sebagai suatu hambatan yang dapat mempengaruhi penerimaan negara yang disebabkan oleh wajib pajak atau badan yang tidak melakukan kewajiban perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara kinerja keuangan (return on asset), ukuran perusahaan, struktur modal (debt to equity ratio), dan tata kelola perusahaan (kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komite audit) terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 – 2023.

Penelitian ini adalah kuantitatif, menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan, teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling untuk memilih 28 perusahaan dari 53 populasi perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Data penelitian ini dianalisis menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji statistik (uji linear berganda dan uji koefisien determinasi), uji hipotesis (uji simultan dan uji parsial). Data penelitian ini menggunakan SPSS versi 25 untuk menentukan hasilnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan memiliki nilai $0,021 < 0,05$. Ukuran perusahaan memiliki nilai $0,143 > 0,05$. Struktur modal memiliki nilai $0,000 < 0,05$. Kepemilikan manajerial memiliki nilai $0,0277 > 0,05$. Dewan komisaris memiliki nilai $0,770 > 0,05$. Komite audit memiliki nilai $0,746 > 0,05$. Tabel Anova a menunjukkan F Hitung $7,459 > F$ Tabel $2,22$ dan nilai sig $0,00 < 0,05$, sehingga disimpulkan variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil penelitian diatas, menunjukkan bahwa (1) Kinerja Keuangan (return on asset) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, (2) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, (3) struktur modal (debt to equity ratio) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, (4) tata kelola perusahaan (kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, (5) kinerja keuangan, ukuran perusahaan, struktur modal, dan tata kelola perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Return On Asset, Ukuran Perusahaan, Debt to Equity Ratio, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Komite Audit, Penghindaran Pajak.

**THE INFLUENCE OF FINANCIAL PERFORMANCE, COMPANY SIZE,
CAPITAL STRUCTURE, AND CORPORATE GOVERNANCE ON TAX
AVOIDANCE (MINING SECTOR COMPANIES LISTED ON THE IDX IN
2021 – 2023)**

ABSTRACT

Tax avoidance is considered an obstacle that can affect state revenue caused by taxpayers or entities that do not carry out tax obligations. This study aims to examine the relationship between financial performance (return on assets), company size, capital structure (debt to equity ratio), and corporate governance (managerial ownership, board of commissioners and audit committee) on tax avoidance in mining sector companies on the Indonesia Stock Exchange in 2021 – 2023.

This study is quantitative, using secondary data from the company's financial statements, the sampling technique is carried out by purposive sampling to select 28 companies from 53 populations of mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2021-2023. The data of this study was analyzed using descriptive statistical tests, classical assumption tests, normality tests, multicollinearity tests, heteroscedasticity tests, autocorrelation tests, statistical tests (multiple linear tests and determination coefficient tests), hypothesis tests (simultaneous tests and partial tests). The data of this study uses SPSS version 25 to determine the results.

The results of the study show that financial performance has a value of $0.021 < 0.05$. The size of the company has a value of $0.143 > 0.05$. The capital structure has a value of $0.000 < 0.05$. Managerial ownership has a value of $0.0277 > 0.05$. The Board of Commissioners has a value of $0.770 > 0.05$. The audit committee has a score of $0.746 > 0.05$. Anova table a shows F Count 7.459 > F Table 2.22 and sig values $0.00 < 0.05$, so it is concluded that the independent variable simultaneously affects the dependent variable. Based on the results of the above research, it shows that (1) Financial Performance (return on assets) has a negative effect on tax avoidance, (2) company size has no effect on tax avoidance, (3) capital structure (debt to equity ratio) has a positive effect on tax avoidance, (4) corporate governance (managerial ownership, board of commissioners, audit committee) has no effect on tax avoidance, (5) financial performance, Company size, capital structure, and corporate governance have a simultaneous effect on tax.

Keywords: Return On Assets, Company Size, Debt to Equity Ratio, Managerial Ownership, Board of Commissioners, Audit Committee, Tax Avoidance.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi tepat pada waktunya yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021 – 2023”. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat – syarat guna mencapai gelar sarjana Akuntansi di Universitas Buddhi Dharma.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada:

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Buddhi Dharma.
4. Bapak Sutandi, S.E., M.Akt. selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah membantu dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan dalam proses pembelajaran di Universitas Buddhi Dharma.

6. Kedua orang tua penulis dan keluarga yang memberikan dukungan serta doa dalam penyelesaian skripsi.
7. Kepada teman – teman penulis Sellyn Septianty, Sunny Kulimno, dan Yunita yang bersama – sama telah berjuang dalam penyusunan skripsi, serta memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada rekan kerja penulis Grace Andreana, S.Ak yang menyemangati dan memotivasi penulis menyusun skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan dan juga dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun dengan segala kerendahan hati, maka penulis mengharapkan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tangerang, 19 Desember 2024



Yunita Asri
20210100026

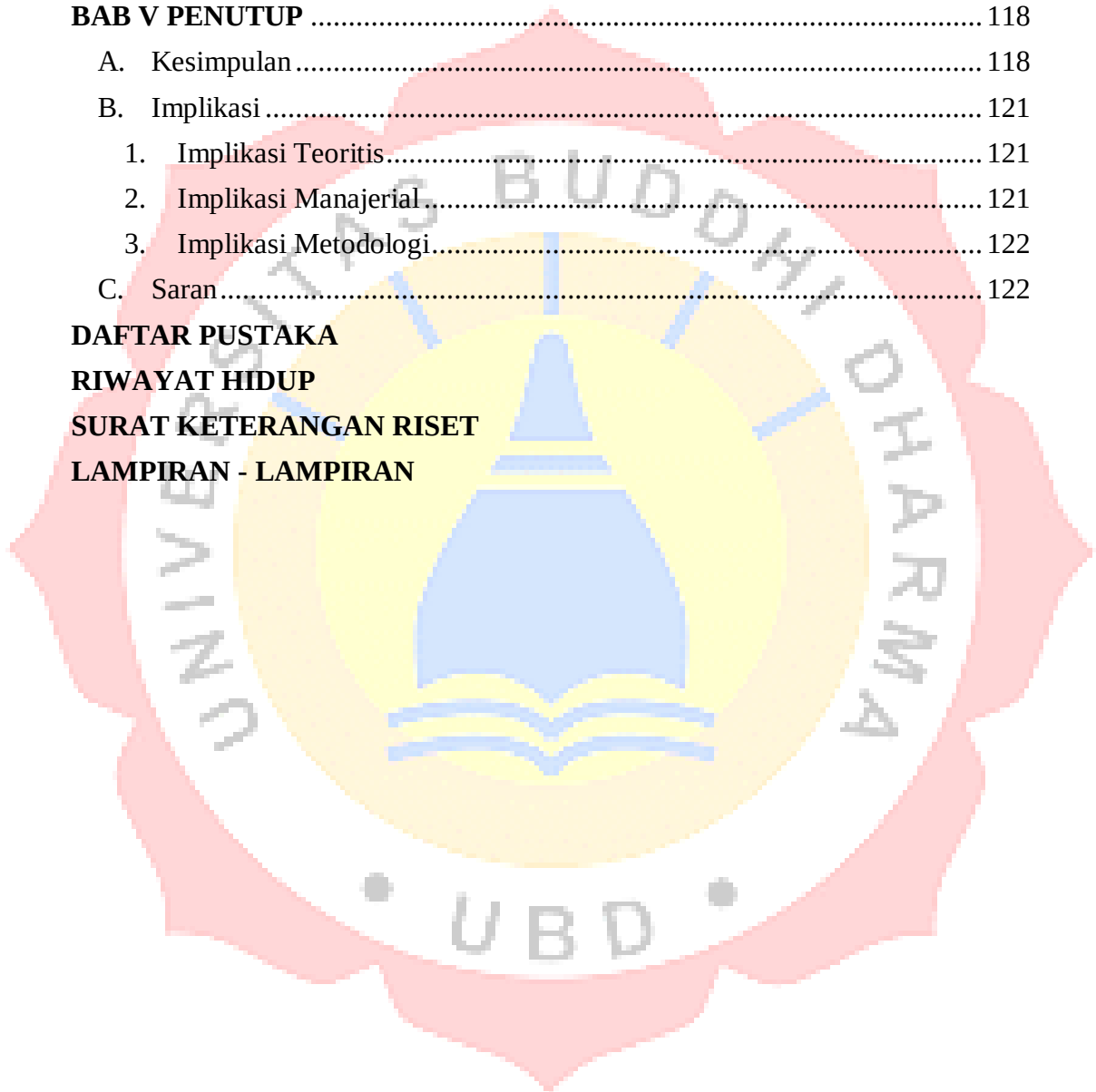
DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR	
JUDUL DALAM	
LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Gambaran Umum Teori.....	11
1. Teori Pajak.....	11
2. Kinerja Keuangan.....	15
3. Ukuran Perusahaan.....	18

4. Struktur Modal.....	21
5. Tata Kelola Perusahaan.....	24
6. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).....	32
B. Hasil Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Pemikiran.....	54
D. Perumusan Hipotesa.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian.....	61
B. Objek Penelitian.....	61
C. Jenis dan Sumber Data	62
1. Jenis Data	62
2. Sumber Data.....	62
D. Populasi dan Sampel	62
1. Populasi.....	62
2. Sampel.....	64
E. Teknik Pengumpulan Data	66
1. Kepustakaan	66
2. Dokumentasi.....	66
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	67
1. Variabel Dependen	67
2. Variabel Independen.....	68
G. Teknik Analisis Data.....	70
1. Analisis Regresi Linear Berganda	71
2. Analisis Statistik Deskriptif	72
3. Uji Asumsi Klasik.....	72
4. Uji Hipotesis.....	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	77
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian	77
1. Kinerja keuangan.....	77
2. Ukuran perusahaan	80
3. Struktur modal	83
4. Tata Kelola Perusahaan.....	86
5. Penghindaran Pajak.....	95
B. Analisis Hasil Penelitian.....	98

1. Uji Analisis Regresi Linear Berganda	98
2. Uji Statistik Deskriptif	100
3. Uji Asumsi Klasik.....	102
4. Uji Hipotesis.....	107
C. Pembahasan	113
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Implikasi	121
1. Implikasi Teoritis.....	121
2. Implikasi Manajerial.....	121
3. Implikasi Metodologi.....	122
C. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
SURAT KETERANGAN RISET	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

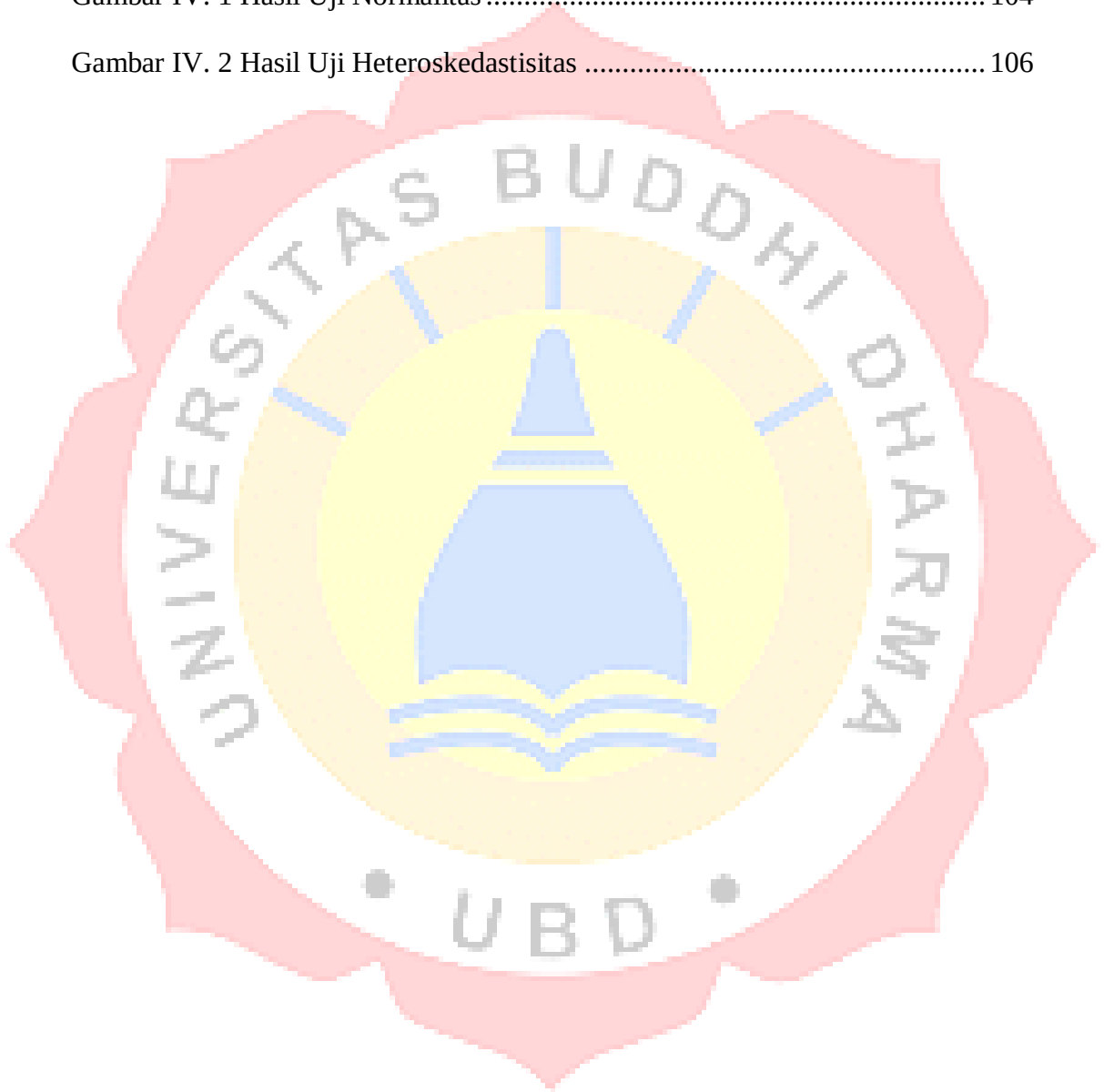


DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Hasil Penelitian Terdahulu	36
Tabel III. 1 Daftar Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI	62
Tabel III. 2 Proses Pemilihan Sampel Penelitian	65
Tabel III. 3 Daftar Perusahaan yang Dijadikan Sampel.....	65
Tabel III. 4 Operasional Variabel Penelitian.....	69
Tabel IV. 1 Return on Asset.....	77
Tabel IV. 2 Ukuran Perusahaan.....	81
Tabel IV. 3 Debt to Equity Ratio.....	84
Tabel IV. 4 Kepemilikan Manajerial	87
Tabel IV. 5 Dewan Komisaris	90
Tabel IV. 6 Komite Audit	93
Tabel IV. 7 Penghindaran Pajak	95
Tabel IV. 8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	98
Tabel IV. 9 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	101
Tabel IV. 10 Hasil Uji Normalitas.....	103
Tabel IV. 11 Hasil Uji Multikolinieritas	105
Tabel IV. 12 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b	107
Tabel IV. 13 Hasil Uji Determinasi Model Summary b	108
Tabel IV. 14 Hasil Uji Parsial (Uji Statistik T) Coefficients a	109
Tabel IV. 15 Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F) ANOVAa	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran.....	54
Gambar IV. 1 Hasil Uji Normalitas	104
Gambar IV. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	106



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Nama dan Kode Perusahaan

Lampiran 2 Hasil Perhitungan *Return On Asset*

Lampiran 3 Hasil Perhitungan Ukuran Perusahaan

Lampiran 4 Hasil Perhitungan *Debt To Equity Ratio*

Lampiran 5 Hasil Perhitungan Kepemilikan Manajerial

Lampiran 6 Hasil Perhitungan Dewan Komisaris

Lampiran 7 Hasil Perhitungan Komite Audit

Lampiran 8 Hasil Perhitungan Penghindaran Pajak

Lampiran 9 Tabel Uji Parsial

Lampiran 10 Tabel Uji Simultan

Lampiran 11 Hasil Output SPSS

Lampiran Laporan Keuangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan dan program sosial lainnya. Di Indonesia Pajak memiliki kedudukan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pajak juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara melalui redistribusi kekayaan dan regulasi kegiatan ekonomi.

Pajak dalam perkembangan di Indonesia harus dikelola dengan baik. Menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib pajak yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara, yang diatur oleh undang – undang dan memiliki sifat memaksa. Pajak ini dibayarkan tanpa imbalan langsung, namun dialokasikan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat secara umum (Januwito, 2022).

Pada sektor pertambangan khususnya subsektor logam memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Menurut data kementerian perindustrian, pada triwulan III tahun 2023, bahwa industri logam mencatat pertumbuhan yang positif sebesar 10,86% yang melampaui jauh dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,94% dan kinerja industri

pengolahan nonmigas yang tumbuh berada di angka 5,02% (Junida, 2024). Pertumbuhan industri khususnya pada sektor logam, didorong oleh tingginya permintaan (*demand*) khususnya ekspor. Maka, industri logam memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan dengan produk dari negara – negara lain, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik dan dapat bersaing secara global.

Berdasarkan kepentingannya terdapat perbedaan antara wajib pajak dan pemerintah. Bagi pemerintah, dana diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar bersumber dari penerimaan atau pendapatan negara. Sementara itu, bagi wajib pajak merupakan bagian dari biaya yang harus dibayarkan atau dikeluarkan dan bahkan dapat mengurangi keuntungan perusahaan.

Pada dasarnya perusahaan tidak hanya beroperasi untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan memperhatikan kepentingan serta tanggung jawab atas kegiatan operasionalnya. Seiring berjalannya waktu, beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak dianggap sebagai pengurang keuntungan yang diperoleh. Maka, wajib pajak mencari cara yang sah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Albasitha & Dinda, 2024).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan tindakan penghindaran pajak yang dapat dilakukan secara sah tanpa melanggar aturan perpajakan, dimana wajib pajak berupaya mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan

perpajakan (Januwito, 2022). Dalam praktiknya, tidak sedikit perusahaan yang mencoba mengurangi beban pajak melalui strategi penghindaran pajak yang sah secara hukum. Hal ini terjadi di sektor – sektor yang memiliki pengaruh ekonomi besar yang bersifat multinasional, salah satunya adalah sektor pertambangan.

Seiring dengan fenomena globalisasi dan kompleksitas operasi lintas negara, penghindaran pajak menjadi perhatian utama bagi otoritas pajak di berbagai negara, termasuk Indonesia. Teknik penghindaran pajak yang umum digunakan adalah *transfer pricing*. Sektor pertambangan tidak hanya memiliki kontribusi dalam perekonomian, tetapi rentan terhadap praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Transfer pricing merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi di negara yang berbeda. *Transfer pricing* dilakukan dengan menentukan harga transfer yang rendah, agar jumlah pengenaan beban pajak dapat lebih kecil. Hal lain yang dapat menyebabkan penghindaran pajak karena perbedaan tarif pajak antar negara yang menimbulkan tujuan pemajakan untuk penghematan pajak apabila tarifnya tinggi, maka menggeser penghasilan ke negara yang tarif pajaknya rendah (Akuntansi et al., 2023).

Di Indonesia tarif umum pajak penghasilan badan tahun 2019 sebesar 28% dari PKP, dan pada awal tahun 2020 tarif pajak menjadi 25%, dan turun menjadi 22% dari masa pajak april 2020 hingga 2021, sesuai Pasal 17 ayat (2a) UU PPh No. 38/2008. Selanjutnya, pada tahun 2022 hingga tahun 2024

tarif pajak penghasilan badan tidak berubah dan tetap 22% sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) N0 7/2021 (Fitriya, 2024).

Adapun fenomena penghindaran pajak dengan *transfer pricing* yang berkaitan dengan sektor pertambangan adalah PT Adaro menjual dengan harga yang lebih rendah kepada Coaltrade anak perusahaannya yang berada di Singapura. Lalu anak perusahaannya menjual kembali dengan harga pasar ke pembeli internasional. Dengan cara ini, PT Adaro mengurangi laba yang dilaporkan di Indonesia, sehingga menurunkan beban pajak dalam negeri, sementara keuntungan lebih direalisasikan di Singapura, yang memiliki tarif pajak rendah. Selain itu, diberitahukan bahwa melalui perusahaan luar negerinya, PT Adaro hanya membayar pajak US\$ 125 juta (Rp1,75 triliun) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Natasya, 2022). Dari kasus tersebut berkaitan dengan sektor pertambangan karena melibatkan transaksi antar perusahaan dalam satu kelompok usaha (entitas afiliasi). Maka, Otoritas Pajak Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memantau praktik ini karena dapat mengurangi penerimaan pajak negara. Penghindaran pajak melalui *transfer pricing* menjadi salah satu fokus pemerintah dalam meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia.

Transfer pricing ini mengacu pada penetapan harga yang dipertukarkan antar perusahaan secara langsung atau tidak langsung. Pada sektor pertambangan biasanya melibatkan pengaturan harga untuk bahan mentah, produk setengah jadi, dan produk akhir, karena sektor tambang

sebagai pemasok bahan baku yang menyediakan bahan mentah seperti biji besi, tembaga, nikel, atau aluminium, yang kemudian diolah oleh perusahaan logam menjadi produk akhir. Beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu, kinerja keuangan, ukuran perusahaan, struktur modal, dan tata kelola perusahaan.

Praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang pertama dilakukan dengan kinerja keuangannya karena kondisi keuangan perusahaan dapat mempengaruhi penghindaran pajak dalam menentukan kemampuan perusahaan untuk mengelola serta dapat digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja keuangan dengan menggunakan rasio profitabilitas. Kedua, ukuran perusahaan karena ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Ketiga, struktur modal karena komposisi antara ekuitas dan utang dalam pendanaan perusahaan dapat digunakan sebagai strategi meminimalisir beban pajak. Keempat, tata kelola perusahaan karena perusahaan diatur dan diawasi dalam menyusun strategi dan pengambilan keputusan termasuk dalam hal perpajakan.

Di dalam tata kelola perusahaan dewan direksi yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi manajemen dan menjaga kepentingan pemegang saham. Apabila, perusahaan memiliki mekanisme tata kelola yang kuat, maka penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif lebih mudah dideteksi oleh dewan pengawas ataupun komite audit, yang memungkinkan dapat mengurangi perusahaan terlibat dalam penghindaran

pajak tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2021 – 2023)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah – masalah sebagai berikut:

1. Adanya peran perusahaan sektor pertambangan dalam perekonomian Indonesia, penghindaran pajak terjadi dapat dilakukan dengan *transfer pricing*, akibatnya dapat mengurangi potensi penerimaan negara.
2. Terdapat perbedaan pelaksanaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah.
3. Terdapat perbedaan tarif pajak yang lebih rendah yang menyebabkan wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 – 2023?

2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 – 2023?
3. Apakah Struktur Modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 – 2023?
4. Apakah Tata Kelola Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 – 2023?
5. Apakah Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, dan Tata Kelola Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 – 2023?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 – 2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 – 2023.

3. Untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 – 2023
4. Untuk mengetahui pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 – 2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal dan Tata Kelola Perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 – 2023.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian, di inginkan dapat bermanfaat untuk pihak – pihak terkait, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan dapat bermanfaat bagi dunia akademis dan dijadikan bahan referensi untuk penelitian yang akan mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas wawasan dan pemahaman tentang Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal dan Tata Kelola Perusahaan terhadap penghindaran pajak.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memperluas pandangan, kepandaian dan pemahaman penulis tentang pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal dan Tata Kelola Perusahaan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, penelitian ini juga dapat berguna untuk menjawab atas keinginan penulis tentang pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap penghindaran pajak.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diinginkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi, menganalisis laporan keuangan perusahaan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan bayangan secara keseluruhan dan memberikan instruksi mengenai hal yang tertulis secara jelas, oleh karena itu penelitian ini tersusun dalam lima bab yang ditulis secara sistematis, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu berisikan tentang latar belakang yang melandasi dilakukannya penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab dua berisi tentang penjelasan konsep teori yang berhubungan dengan variabel dependen, hasil penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga mendeskripsikan pembahasan tentang objek dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel. Teknik pengumpulan data analisis data variabel penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat mendeskripsikan tentang uraian hasil data penelitian yang telah diolah antara variabel independen dan dependen, analisis hasil data penelitian dan melakukan pengujian hipotesis serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab lima di isi dengan simpulan yang dibuat berdasarkan objek penelitian yang telah diuji serta saran terkait yang bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Teori Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak menurut (Wibawa, 2023, 1) dalam bukunya mengemukakan bahwa:

“Perpajakan negara merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara, dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak. Pajak juga dianggap sebagai pilar negara utama penerimaan negara yang berkontribusi terhadap pendapatan negara.”

Dalam buku (Sihombing & Sibagariang, 2020, 1) Prof. Dr. H. rochmat Soemitro, S.H, menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran masyarakat yang diwajibkan kepada negara berdasarkan peraturan perundang – undangan, tanpa adanya imbalan dan digunakan untuk membiayai keperluan umum negara.”

Menurut Undang – undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak atau badan, yang sifatnya memaksa berdasarkan ketentuan hukum, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat.”

Kesimpulannya bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh masyarakat, baik wajib pajak maupun badan, kepada negara berdasarkan peraturan yang berlaku. Pajak ini bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar

pajak, melainkan digunakan oleh negara untuk kepentingan umum, seperti membiayai pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang penting untuk mendukung operasional negara dan pelayanan publik.

b. Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang diperoleh dengan mengumpulkan dana dari wajib pajak ke kas negara digunakan untuk membiayai pembangunan nasional serta pengeluaran negara lainnya.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak adalah alat yang digunakan untuk menjalankan dan mengatur kebijakan negara dibidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak juga dapat digunakan untuk menyeimbangkan distribusi pendapatan guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilitas

Pajak memiliki peran dalam menjaga stabilitas ekonomi, seperti saat terjadi inflasi, pemerintah memberlakukan pajak tinggi untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.

c. Jenis – Jenis Pajak

Pajak terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, sebagai berikut:

1. Pajak berdasarkan golongannya

1) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang hanya dikenakan kepada wajib pajak ketika terjadi peristiwa atau tindakan tertentu. Pajak ini tidak dipungut secara rutin, tetapi hanya ketika peristiwa atau tindakan yang memicu kewajiban membayar pajak terjadi.

2) Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh kantor pajak. Surat tersebut mencantumkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB).

2. Pajak berdasarkan pemungutannya

1) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan hanya berlaku untuk masyarakat di wilayah tersebut, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dll.

2) Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui lembaga – lembaga terkait, seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea, dan Cukai, serta kantor – kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dll.

3. Pajak berdasarkan sifatnya

1) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objek yang dikenakan pajak. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, dll.

2) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan subjek yang dikenakan pajak. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

1. *Self Assessment System*

Pemungutan pajak yang membebankan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak. Arti lain, wajib pajak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak ke kantor pajak.

2. *Official Assessment System*

Pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah atau aparat untuk menentukan besarnya pajak terutang. Dalam *Official Assessment System*, wajib pajak bersikap pasif dan besarnya pajak yang harus dibayarkan baru ada setelah pemerintah mengeluarkan surat ketetapan pajak.

3. *With Holding System*

Pemungutan pajaknya dihitung bukan oleh wajib pajak, dan pemerintah tetapi dengan pihak ketiga. Seperti pemotongan penghasilan karyawan dilakukan oleh bendahara instansi. Jadi, karyawan tidak perlu datang ke kantor pajak untuk membayar pajak.

e. Perlawanan Terhadap Pajak

1. Perlawanan Pasif

Perlawan pasif terjadi dalam bentuk hambatan yang menyulitkan pemungutan pajak dan berkaitan erat dengan kondisi ekonomi.

2. Perlawanan Aktif

Perlawan aktif tampak jelas melalui berbagai tindakan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dengan tujuannya untuk menghindari kewajiban membayar pajak.

2. Kinerja Keuangan

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut (Albasitha & Dinda, 2024) mengatakan bahwa:

“Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan atau organisasi telah menjalankan aktivitas keuangannya dengan baik dan akurat serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”

Menurut (Melissa, 2024) mengatakan bahwa:

“Kinerja keuangan adalah ukuran yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi tingkat keuntungan yang dicapai. Selain itu, kinerja keuangan juga mencerminkan hasil dari aktivitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan dalam periode tertentu dan dicatat dalam laporan perusahaan.”

Sedangkan pengertian kinerja keuangan dapat dilihat dalam buku (Esty et al., 2023, 15) mengemukakan bahwa:

“Kinerja keuangan biasanya dijadikan sebagai pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi. Dalam melakukan investasi, biasanya yang dilakukan oleh seorang investor adalah melihat keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut, karena biasanya investor tertarik kepada perusahaan yang memperoleh laba yang tinggi. Dengan memperoleh laba yang tinggi, maka dapat menentukan tingkat pengembalian yang diperoleh investor dan dapat memotivasi untuk meningkatkan investasinya dan harga saham meningkat.”

Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan alat ukur penting yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan keuangan perusahaan. Kinerja keuangan tidak hanya mengukur seberapa baik perusahaan dalam mengelola aktivitas keuangannya, tetapi juga digunakan oleh investor untuk menilai potensi investasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan kinerja keuangan *Return On Asset*.

Menurut (Widodo & Irwan, 2023) mengatakan bahwa:

“ROA merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Semakin besar laba

yang dihasilkan oleh perusahaan, semakin tinggi pula kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini akan mempengaruhi perencanaan pajak yang dibuat oleh perusahaan”.

Sedangkan menurut (Fransisca & Parameswari, 2022) menyatakan bahwa ROA adalah rasio yang menggunakan aset sebagai dasar untuk menghitung laba. Dengan rasio ROA dapat menilai kapasitas perusahaan dalam mencapai keuntungan bersih setelah pajak atau *Earning After Tax* (EAT) melalui pemanfaatan aset secara efektif (Gunawan & Simbolon, 2024).

b. Analisis laporan keuangan

Pengertian analisis laporan keuangan dalam buku (Rudianto, 2021, 42–43) mengemukakan bahwa :

“Laporan keuangan perusahaan merupakan hasil akhir yang telah dicapai dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.”

c. Langkah – langkah dalam menganalisis laporan keuangan

- 1) Mengidentifikasi tujuan dari analisis secara umum
- 2) Merumuskan pertanyaan dan kriteria yang spesifik berdasarkan tujuan analisis
- 3) Mengidentifikasi alat untuk menganalisis laporan keuangan yang efektif dan efisien
- 4) Menginterpretasikan hasil

d. Metode analisis Laporan Keuangan

- 1) Melakukan analisis laporan keuangan
- 2) Melakukan analisis *trend*

- 3) Melakukan analisis *common size*
 - 4) Melakukan analisis dengan proporsi per jenis akun
 - 5) Melakukan analisis rasio keuangan
- e. Analisis rasio

Menurut Diana & Tjiptono (2022) dalam jurnal (Melissa, 2024) menganalisis kinerja keuangan dapat menggunakan rasio, sebagai berikut:

- 1) Rasio Likuiditas
- 2) Rasio Solvabilitas
- 3) Rasio Aktivitas
- 4) Rasio profitabilitas
- 5) Rasio Nilai Pasar

3. Ukuran Perusahaan

a. Pengertian ukuran perusahaan

Menurut (Wibowo et al., 2021) mengatakan bahwa:

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan ukuran, pendapatan, total aset, dan total modal. Semakin besar ukuran pendapatan, total aset, dan total modal akan mencerminkan keadaan perusahaan yang semakin kuat.”

Menurut Muchlisin dalam jurnal (Januwito, 2022) mengatakan bahwa:

“Ukuran perusahaan merupakan suatu skala, variabel, atau indikator yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti total aktiva, *log size*, nilai pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal, dll.”

Menurut (Junaldi & Samosir, 2022) mengatakan bahwa:

“Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang mencerminkan besar kecilnya suatu perusahaan, yang dapat memberikan gambaran mengenai pendapatan yang dihasilkan serta kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan.”

Menurut (parameswari et al., 2018) mengatakan bahwa :

”perusahaan dibagi menjadi perusahaan kecil dan besar berdasarkan ukurannya, dimana perusahaan besar memiliki sistem manajemen yang lebih rumit dan laba yang lebih tinggi. Sebagai hasilnya, perusahaan besar menghadapi masalah dan risiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan kecil.”

Sedangkan pengertian ukuran perusahaan dalam buku (Setiawan, 2022, 171) mengemukakan bahwa:

“Ukuran perusahaan ialah Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin besar pula kebutuhan dananya. Salah satu sumber dana tersebut bisa berasal dari pendanaan eksternal, yaitu melalui utang.”

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, ukuran perusahaan merupakan skala atau indikator yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan, yang diukur melalui berbagai faktor seperti pendapatan, total aset, total modal, log size, nilai pasar, dan saham. Ukuran perusahaan mencerminkan kekuatan keuangan dan operasionalnya. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pendapatan yang dihasilkan dan semakin tinggi kebutuhan dana, termasuk potensi pendanaan eksternal melalui utang. Menurut (Aprilyanti & Sugiakto, 2020) semakin tinggi aset yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan tersebut mampu dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam menghitung ukuran perusahaan dapat menggunakan rumus:

b. Klasifikasi usaha

Besarnya usaha berdasarkan UU No.20 Tahun 2008 Pasal 1 (Goh, 2023,48) menuturkan bahwa klasifikasi usaha, sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro merupakan jenis usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum swasta sesuai dengan kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang
- 2) Usaha kecil merupakan jenis usaha produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha, dan tidak merupakan anak perusahaan atau cabang usaha yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau besar sesuai dengan ketentuan hukum
- 3) Usaha menengah merupakan jenis usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh individu atau korporasi, dan tidak termasuk anak perusahaan atau afiliasi dari perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki, mengendalikan, atau menjadi bagian dari usaha kecil atau besar
- 4) Perusahaan besar merupakan jenis usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh pengusaha dengan kekayaan bersih atau pendapatan tahunannya melebihi usaha menengah. Perusahaan ini mencakup badan usaha milik negara, swasta nasional, usaha patungan, serta badan usaha asing yang beroperasi di Indonesia.

c. Faktor – faktor yang mempengaruhi ukuran perusahaan

- 1) Besarnya modal perusahaan yang dibutuhkan
- 2) Kelangsungan hidup karyawan
- 3) Bertanggung jawab terhadap utang perusahaan
- 4) Pemimpin

4. Struktur Modal

a. Pengertian struktur modal

Menurut Wi (2022) yang dikutip dalam jurnal (Puspita, 2024) mengatakan bahwa:

“Struktur Modal merupakan bagian penting dari manajemen keuangan yang memiliki peran krusial dalam menentukan kebutuhan dasar perusahaan. Keputusan terkait struktur modal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan tujuan memaksimalkan pendapatan yang dihasilkan.”

Menurut (Meliana & Susanti, 2024) mengatakan bahwa Struktur modal adalah Beban utang jangka panjang perusahaan yang dapat dilihat dari konsistensi kebiasaan belanjanya. Berdasarkan pengertian diatas, disimpulkan bahwa Struktur modal adalah sumber dana jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi. Dengan struktur modal yang tepat bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat dari dana yang digunakan dalam mempertimbangkan keseimbangan antara risiko dan biaya modal yang ditanggung perusahaan. Maka, Investor bisa menilai keseimbangan antara risiko dan keuntungan dengan mengamati struktur modal perusahaan, yang menunjukkan sejauh mana utang

digunakan untuk investasi. Penelitian ini penulis menggunakan *Debt To Equity Ratio (DER)* karena rasio ini memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana perusahaan menggunakan utang dibandingkan dengan ekuitas untuk mendanai operasinya.

b. Faktor - faktor yang mempengaruhi struktur modal

Menurut (Oktarina et al., 2023) struktur modal dipengaruhi oleh

4 (empat) faktor – faktor, sebagai berikut:

- 1) Struktur Aktiva
- 2) Pertumbuhan perusahaan
- 3) Likuiditas
- 4) Profitabilitas.

c. Teori struktur modal

Teori struktur modal yang dikemukakan (Irma et al., 2021, 81)

menjelaskan cara menerapkan penentuan unsur – unsur modal di dalam sebuah perusahaan dalam berbagai cara pandang antara lain:

1) Teori Pendekatan Tradisional

Pendekatan Tradisional beranggapan bahwa struktur modal berdampak terhadap nilai perusahaan. Pendekatan ini menyatakan bahwa perusahaan sebaiknya fokus pada pencapaian struktur modal yang optimal.

2) Teori Pendekatan Modigliani dan Miller (MM)

Menurut Modigliani & Miller, teori pendekatan dibagi menjadi 2 proposisi, yaitu:

a. **Proposisi I (Tanpa Pajak)**

Menyatakan bahwa perusahaan menggunakan utang akan sama dengan nilai perusahaan yang tidak menggunakan utang. Artinya, dalam kondisi tanpa pajak, struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan

b. **Proposisi II (Dengan Pajak)**

Untuk memperbaharui analisisnya, Modigliani & Miller memasukkan variabel pajak. Bahwa mereka menyimpulkan penggunaan aset dan sumber dana akan meningkatkan nilai perusahaan serta menurunkan biaya modal rata – rata tertimbang.

3) **Teori Asimetri Informasi dan *Signaling***

Teori asimetri menyatakan bahwa *stakeholder* perusahaan tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang prospek dan risiko perusahaan. Sebagai contoh, manajer perusahaan memiliki informasi yang lebih mendalam tentang kondisi perusahaan dibandingkan dengan pihak eksternal.

4) **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Struktur modal diatur sedemikian rupa untuk mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul diantara berbagai kelompok yang terkait dengan perusahaan. Konflik kepentingan dapat terjadi antara pemegang saham (pemilik) dan kreditur, serta antara pemegang saham dan manajemen.

d. Pendekatan NI & NOI

Pendekatan – pendekatan yang digunakan untuk menganalisis struktur modal berdasarkan (Triyonowati & Maryam, 2022, 52–53), sebagai berikut:

1) Pendekatan *Net Income* (NI)

Pada pendekatan ini, sebagian laba diperuntukkan bagi pemegang saham dengan menggunakan tingkat kapitalisasi yang tetap yaitu biaya modal sendiri.

Asumsi yang mendasari, yaitu:

- a. Biaya utang dan biaya modal sendiri tidak berubah walaupun struktur modalnya berubah.
- b. Biaya utang sebelum pajak lebih rendah dari biaya modal

2) Pendekatan *Net Operating Income* (NOI)

Pada pendekatan ini, tingkat biaya modal rata – rata tertimbang adalah tetap. Asumsi yang mendasari adalah biaya utang dan biaya modal keseluruhan tetap. Pendekatan ini perubahan pada struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai total perusahaan

5. Tata Kelola Perusahaan

a. Pengertian Tata kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Menurut (Mandagie & Herijawati, 2022) mengatakan bahwa:

“Tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur pengelolaan perusahaan secara profesional suatu sistem yang bertujuan untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara

profesional berdasarkan prinsip – prinsip seperti akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, kesetaraan, dan transparan.”

Menurut (Sutisna, 2020) mengatakan bahwa:

“Penerapan Tata Kelola Perusahaan menjadi kebutuhan penting agar persaingan global yang semakin ketat tidak merugikan banyak perusahaan. Pada dasarnya, prinsip-prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan fokus pada serangkaian pola perilaku perusahaan, yang mencakup kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, serta perlakuan terhadap pemegang saham dan *stakeholders*.”

Menurut (Yonita & Aprilyanti, 2022) mengatakan bahwa:

”Tata kelola perusahaan adalah suatu prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan, serta memberikan tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan secara umum.”

Di Indonesia konsep Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Perusahaan telah diangkat secara luas melalui Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Regulasi yang mendukung penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia adalah Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur tata kelola perusahaan terbuka. Dengan adanya penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia, dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta mencegah risiko yang dapat berpengaruh secara berkelanjutan terhadap bisnis.

Diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik maka berdampak juga terhadap suasana kerja yang nyaman dan tertib. Maka integritas perusahaan juga lebih dipercaya oleh pemangku kepentingan eksternal (*stakeholder*), terciptanya profesionalisme karyawan, kinerja keuangan yang baik, dan stabilitas harga yang baik. Dengan diterapkannya prinsip Tata Kelola Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang kemungkinan dilakukan oleh dewan pengurus untuk kepentingan pribadi, dan umumnya untuk meningkatkan kepercayaan investor. Di Indonesia Mekanisme tata kelola perusahaan telah diterapkan sejak pembentukan KNKG pada tahun 1999, dengan diterbitkannya Pedoman Nasional *Good Corporate Governance*. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal. Salah satu alasan kegagalan implementasi tata kelola perusahaan adalah penerapan yang parsial dan sporadis, yang hanya terbatas pada penerbitan aturan tanpa diikuti oleh langkah-langkah lanjutan seperti pelatihan, sosialisasi, pengembangan, serta umpan balik untuk memperbaiki mekanisme *Corporate Governance*.

b. Manfaat Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Menurut Forum For *Corporate Governance In Indonesia* (FCGI) yang dikemukakan (Yuliusman & Putra, 2022, 26), manfaat penerapan tata kelola perusahaan sebagai berikut:

- 1) Dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan operasional perusahaan menjadi efisien, dan mengutamakan pelayanan kepada pemangku kepentingan
- 2) Mudah untuk mendapatkan pendanaan yang murah sehingga dapat meningkatkan nilai korporasi
- 3) Dapat mengembalikan kepercayaan investor agar berinvestasi di Indonesia
- 4) Kinerja perusahaan yang baik maka pemegang saham juga akan merasa puas karena pada saat itu juga akan meningkatkan nilai pemegang saham dan dividen.

c. Prinsip – prinsip tata kelola perusahaan

Berdasarkan PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara yaitu:

- 1) Transparansi (*transparency*), yaitu prinsip dengan menyediakan sarana komunikasi yang efektif dan responsif dalam memperoleh informasi tentang perusahaan, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat memahami kinerja perusahaan
- 2) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu prinsip akuntabilitas dengan mengoptimalkan kinerja dan peran setiap individu perusahaan sehingga semua kegiatan perusahaan dilakukan dengan efektif dan

efisien. Untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan

3) Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu prinsip yang diterapkan dengan cara bertanggung jawab terhadap masyarakat maupun lingkungan yang terkait, mematuhi peraturan, serta menghindari segala bentuk transaksi yang dapat merugikan pihak lain diluar ketentuan yang telah disepakati

4) Kemandirian (*independency*), yaitu prinsip dengan mengelola peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri tanpa adanya tekanan dari pihak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

5) Kewajaran (*fairness*), yaitu prinsip kesetaraan dengan memperhatikan hak setiap pemangku kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

d. Tujuan penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan

Adapun tujuan penerapan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan berdasarkan peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor: PER/01/MBU/20, sebagai berikut:

1) Meningkatkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga mampu menjaga eksistensinya dan beroperasi secara berkelanjutan untuk mencapai visi dan tujuan BUMN

2) Mengupayakan pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memperkuat peran dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum

3) Mendorong agar organisasi perusahaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan berlandaskan nilai moral yang tinggi, patuh pada peraturan perundang-undangan, serta memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan dan kelestarian lingkungan sekitar BUMN

4) Meningkatkan peran BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional

5) Menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan investasi di dalam negeri.

e. Mekanisme Tata kelola Perusahaan

Dibedakan menjadi dua mekanisme, yaitu mekanisme eksternal dan mekanisme internal. Mekanisme eksternal terdiri dari investor, kreditur, dan akuntan publik. Sedangkan menurut (Muntahanah & Murdijaningsih, 2020), mekanisme internal terdiri dari :

1) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi dimana seorang manajer yang memiliki saham atau memegang peran ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham dalam perusahaan. Kepemilikan yang dimiliki manajemen dapat dilakukan oleh

direksi, manajemen, komisaris, ataupun pihak lain yang memiliki peran dalam pengambilan suatu keputusan perusahaan.

Menurut (Prayoga & Sumantri, 2023) mengatakan bahwa:

“kepemilikan manajerial merupakan situasi dimana manajer perusahaan memegang peran sebagai manajemen serta pemegang saham, dan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan.”

Kepemilikan manajerial penting bagi suatu perusahaan karena dapat membantu menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Apabila manajer memiliki saham di perusahaan, maka akan cenderung termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan apabila perusahaan mencapai keberhasilan akan berdampak langsung pada keuntungan pribadi, selain itu juga dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, dan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas dalam pengambilan keputusan strategis.

2) Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan badan pengawasan di sebuah perusahaan yang memiliki tugas dalam mengawasi kebijakan manajemen dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehari – hari, tetapi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan dijalankan sesuai dengan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, dewan komisaris juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan

memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam buku investasi *research and development* tata kelola dan nilai perusahaan, dewan komisaris memiliki peran utama dalam sistem tata kelola perusahaan, di mana mereka bertugas untuk memantau kebijakan manajemen serta implementasinya, sekaligus memberikan saran kepada Direksi (Yuliusman & Putra, 2022, 28).

3) Komite audit

Komite audit merupakan pendukung yang berada dibawah dewan komisaris. Komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pengelolaan *Independence, Professionalism, Competence* (IPC) sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komite audit memiliki tugas untuk meninjau laporan keuangan yang dihasilkan, hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan manajemen dalam melakukan manipulasi laba. Selain itu, komite audit harus bersifat independen, sehingga bebas dari kepentingan perusahaan ataupun pengaruh negatif lainnya. Semakin independen komite audit, maka kualitas laporan keuangan perusahaan akan dipercaya (Kartika & Simbolon, 2022).

Menurut (Dessy & Simbolon, 2022) mengemukakan bahwa :

”komite audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja manajemen, membantu akuntan publik dalam mempertahankan independensinya, serta memberikan rekomendasi kepada manajemen terkait masalah pencatatan akuntansi, agar laporan audit dan laporan keuangan dapat di pertanggung jawabkan.”

Rumus yang digunakan dalam perhitungan komite audit, sebagai berikut:

Tugas komite audit menurut (Prihandini, 2023, 85), sebagai berikut:

- a. Memberi rekomendasi kepada dewan komisaris dalam aspek pengawasan. Mengawasi audit yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern, melalui laporan audit
- b. Mereview hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan regulator atau otoritas yang berwenang, yang hasilnya akan di *review* oleh dewan komisaris.
- c. Memberikan rekomendasi penunjukan Auditor Eksternal atau Kantor Akuntan Publik
- d. Mereview kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit yang berlaku
- e. Mereview kesesuaian laporan keuangan tahunan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

6. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

- a. Pengertian penghindaran pajak

Menurut (Mappadang, 2021, 32) mengatakan bahwa:

“Penghindaran pajak diartikan sebagai skema untuk menghindari pembayaran pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan celah hukum dalam peraturan perpajakan suatu negara. Celah hukum ini bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak karena tidak adanya aturan yang jelas terkait seka atau transaksi.”

Menurut (Luman & Limajatini, 2023) mengatakan bahwa:

“Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam peraturan hukum yang berlaku.”

Menurut (Yosika & Samara, 2023) mengatakan bahwa:

“Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun orang pribadi untuk mengurangi kewajiban pajak secara sah dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.”

Menurut (Zalukhu & Aprilyanti, 2021) mengatakan bahwa:

”penghindaran pajak diartikan sebagai upaya wajib pajak untuk menghindari pajak terutang dengan menggunakan cara – cara yang telah diatur dalam peraturan perpajakan, yang tidak menimbulkan perselisihan antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun badan usaha, dengan tujuan mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, wajib pajak maupun badan usaha sering terlibat dalam penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam peraturan perpajakan, di mana tidak ada aturan yang jelas. Meskipun penghindaran pajak bersifat sah menurut hukum, pelaksanaannya memanfaatkan celah regulasi untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar.

b. Jenis penghindaran pajak

Berdasarkan aturan hukum Menurut James Kessler dalam buku (Mappadang, 2021, 35), penghindaran pajak dibagi menjadi:

1) *Tax Avoidance* yang diperbolehkan (*Acceptable Tax Avoidance*)

Acceptable Tax Avoidance dilakukan oleh wajib pajak dengan menjalankan transaksi yang tujuannya bukan semata – mata untuk menghindari pajak tanpa melakukan manipulasi transaksi.

Karakteristik *Acceptable Tax Avoidance*, sebagai berikut:

- a. Tujuan bisnis kearah yang positif atau baik
- b. Tidak memiliki tujuan yang semata – mata untuk menghindari pajak
- c. Tidak melakukan transaksi yang dimanipulasi.

2) *Tax Avoidance* yang tidak diperbolehkan (*Unacceptable Tax Avoidance*)

Unacceptable Tax Avoidance transaksi dilakukan semata – mata untuk menghindari pajak dan dengan memanipulasi transaksi agar menimbulkan biaya atau kerugian.

Karakteristik *Unacceptable Tax Avoidance* sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki tujuan bisnis yang positif;
- b. Tujuannya hanya untuk menghindari pajak;
- c. Terdapat manipulasi transaksi untuk menimbulkan biaya atau kerugian.

3) Praktik penghindaran pajak di Indonesia

Menurut (Mappadang, 2021, 38–41) wajib pajak mempunyai berbagai cara untuk melakukan praktik penghindaran pajak, sebagai berikut:

a. Hibah

Pasal 4 ayat (3) Huruf a Angka 2 dalam UU No. 36 tahun 2008 dijelaskan bahwa harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dari objek pajak. Untuk menghindari pembebanan pajak atas hibah tersebut, pemberi hibah memanfaatkan celah dalam peraturan pajak. Caranya, tanah dan bangunan dihibahkan terlebih dahulu kepada anak kandung dari kakek, sesuai ketentuan “garis keturunan lurus satu derajat.” Setelah itu, tanah dan bangunan tersebut dihibahkan kembali dari anak kepada cucu yang sebenarnya menjadi penerima hibah.

b. Pinjaman nominal besar ke bank

Mengutip Pasal 6 ayat (1) Huruf a dalam UU Pajak Penghasilan, bunga merupakan biaya yang berkaitan langsung atau tidak langsung dalam aktivitas bisnis. Apabila wajib pajak menerima pinjaman dalam jumlah besar, bunga yang dibayarkan akan sebanding dengan besarnya pinjaman. Wajib pajak kemudian memasukkan biaya bunga kedalam laporan keuangan fiskal, meskipun pinjaman tidak dicatat sebagai peningkatan modal, sehingga tidak ada peningkatan penjualan atau keuntungan yang diterima wajib pajak dan wajib pajak dapat menghindari beban pajak yang besar.

c. Pemanfaatan PP No.23 tahun 2018

Melalui ketentuan PP No. 23 tahun 2018 sering disalahgunakan oleh pengusaha yang enggan untuk membayar pajak penghasilan. Dengan adanya kebijakan ini bagi pengusaha UMKM hanya diwajibkan membayar pajak dengan tarif 0,5% dari bruto. Maka oknum nakal dapat membuat laporan keuangan badan dan usaha pribadi agar peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4,8 miliar.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengkaji kembali hasil dari penelitian terdahulu terkait variabel yang diteliti. Hal ini dilakukan oleh penulis agar menambah pengetahuan tentang variabel yang akan diuji. Penulis menggunakan beberapa sumber penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi penulisan dalam melakukan penelitian ini. Berikut merupakan bahan referensi yang digunakan oleh penulis:

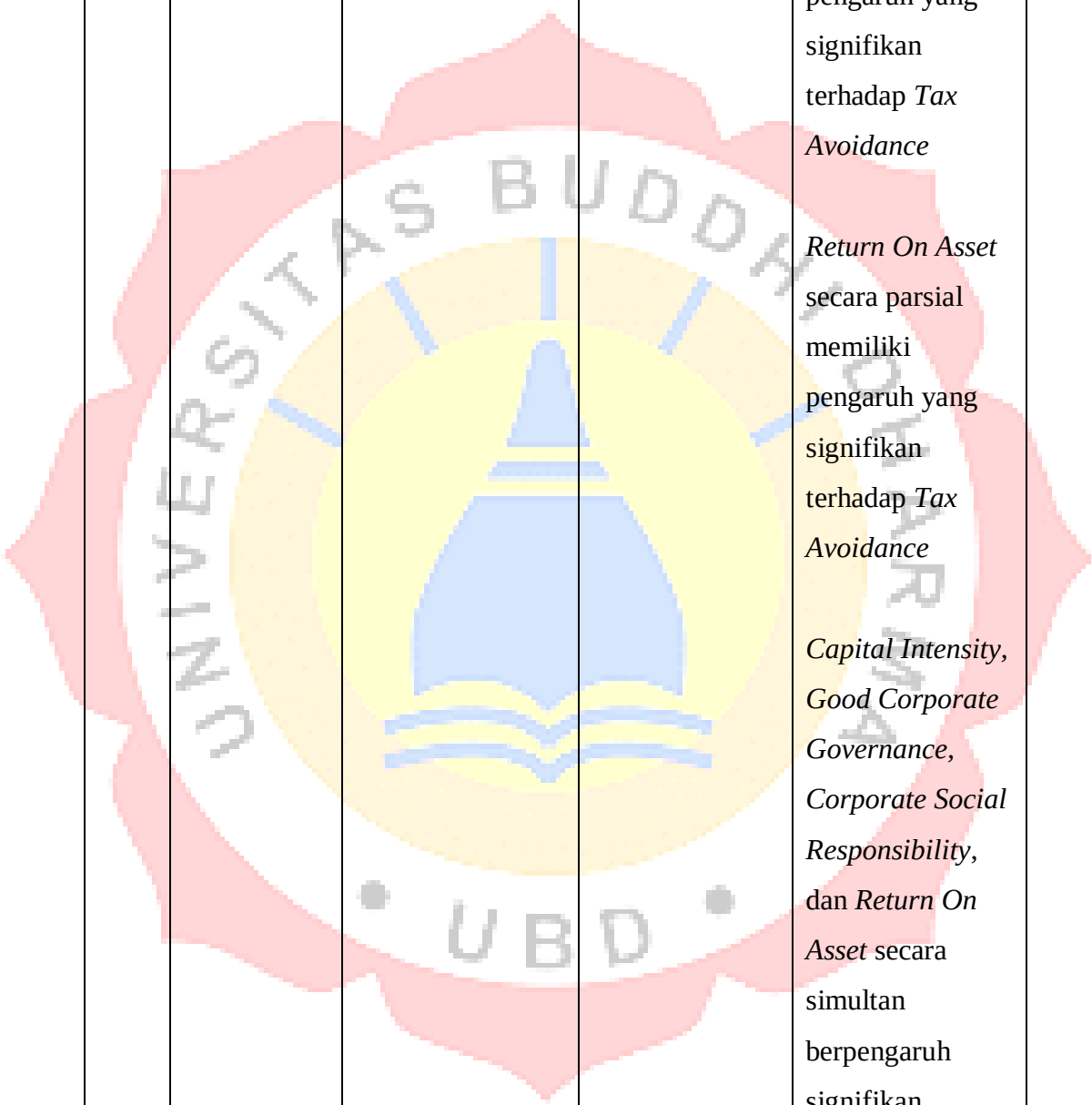
Tabel II. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Albasitha & Dinda, 2024)	Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Struktur Modal, Manajemen Laba, Karakteristik Perusahaan,	Variabel Independen: Pengaruh Kinerja Keuangan, Struktur Modal, Manajemen	Pengujian hipotesis berpengaruh positif signifikan, yaitu: -kinerja keuangan

		Kantor Akuntan Publik, <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia	Laba, Karakteristik Perusahaan, Kantor Akuntan Publik, <i>Good Corporate Governance</i> . Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	terhadap struktur modal -manajemen laba terhadap <i>tax avoidance</i> -struktur modal terhadap manajemen laba -kantor akuntan public terhadap <i>good corporate governance</i> -kantor akuntan public terhadap <i>tax avoidance</i> . pengujian hipotesis yang berpengaruh signifikan negatif, yaitu: -kinerja keuangan terhadap <i>tax avoidance</i> ; -manajemen laba terhadap karakteristik; -karakteristik terhadap kantor akuntan public;
--	--	---	---	---

				-karakteristik terhadap <i>tax avoidance</i>; -<i>good corporate governance</i> terhadap <i>tax avoidance</i>. Pengujian hipotesa yang menghasilkan berpengaruh tidak signifikan positif, yaitu struktur modal terhadap <i>tax avoidance</i>.
2.	(Melissa, 2024)	Pengaruh Kinerja Keuangan, Struktur Modal, Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor <i>Food and Beverage</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Variabel Independen: Kinerja Keuangan, Struktur Modal, Kualitas Audit, dan Komite Audit Variabel Dependen: Nilai Perusahaan	Performa Keuangan memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap nilai perusahaan Struktur modal, kualitas audit, dan komite audit tidak memiliki pengaruh parsial

		Periode 2018-2022		terhadap nilai perusahaan; Secara bersamaan, performa keuangan, struktur modal, kualitas audit, dan komite audit memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai perusahaan.
3.	(Widodo & Irwan, 2023)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Corporate Social Responsibility</i> , Dan <i>Return On Asset</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode	Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i> , <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Corporate Social Responsibility</i> , Dan <i>Return On Asset</i> . Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Capital Intensity</i> secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> <i>Good Corporate Governance</i> secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>



				<i>Corporate Social Responsibility</i> secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> <i>Return On Asset</i> secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> <i>Capital Intensity, Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan Return On Asset</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.
4.	(Wibowo et al., 2021)	Pengaruh Ukuran Perusahaan,	Variabel Independen:	Ukuran perusahaan tidak

		<i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Variabel Opinion Shooping Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur di BEI	Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Capital intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> serta uji kelayakan model yang terbaik adalah <i>Fixed Effect</i> (FE).
5.	(Januwito, 2022)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i>, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i>, dan Pertumbuhan Penjualan Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil uji parsial (T) variabel Ukuran Perusahaan, Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> Hasil uji simultan (F) menunjukkan bahwa secara bersama – sama semua variabel

				bebas dalam penelitian ini berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
6.	(Junaldi & Samosir, 2022)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perkebunan Sawit yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021)	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Pertumbuhan Penjualan Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i> , kepemilikan institusional, dan pertumbuhan penjualan secara parsial dan secara simultan memberikan pengaruh kepada <i>tax avoidance</i>
7.	(Puspita, 2024)	Pengaruh Profitabilitas, Struktur aktiva, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan	Variabel Independen: Profitabilitas, Struktur aktiva, Ukuran Perusahaan,	Profitabilitas, Likuiditas dan Struktur Aktiva berpengaruh negatif terhadap Struktur Modal

		Penjualan Terhadap Struktur Modal (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)	dan Pertumbuhan Penjualan Variabel Dependen: Struktur Modal	Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang menguntungkan dan besar terhadap struktur modal, namun tidak terhadap pertumbuhan penjualannya Profitabilitas, likuiditas, Struktur Aktiva, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh terhadap struktur modal.
8.	(Meliana & Susanti, 2024)	Pengaruh Struktur Modal, Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Dividen, dan Keputusan	Variabel Independen: Struktur Modal, Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Dividen, dan	Struktur modal berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Kepemilikan saham

		Investasi terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Dalam Sub Sektor <i>Food and Beverages</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022	Keputusan Investasi Variabel Dependen: Nilai Perusahaan	manajemen berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Struktur modal, kepemilikan saham manajemen, kebijakan dividen, keputusan Investasi bersama berpengaruh pada nilai perusahaan.
9.	(Oktarina et al., 2023)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	Variabel Independen:	Secara simultan struktur aktiva, pertumbuhan

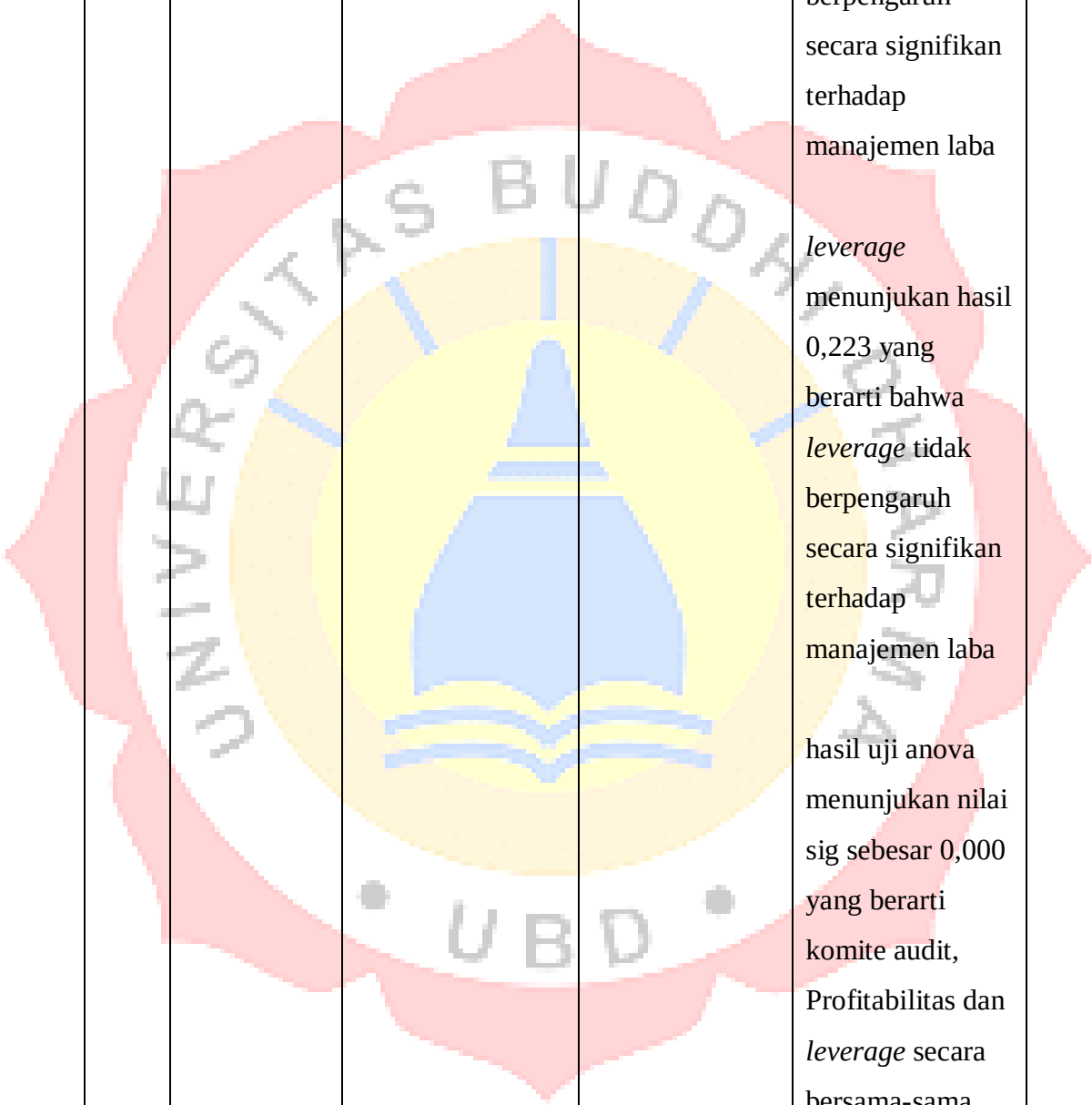
		Struktur Modal Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Pada Subsektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Struktur Aktiva, Pertumbuhan Perusahaan, Likuiditas, Profitabilitas, Variabel Independen: Struktur Modal	perusahaan, likuiditas dan profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. Sedangkan secara parsial variabel yang berpengaruh signifikan terhadap struktur modal adalah struktur aktiva, likuiditas dan profitabilitas. Sedangkan variabel pertumbuhan perusahaan, tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal
10.	(Mandagie & Herijawati, 2022)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Profitabilitas Perusahaan dan Pertumbuhan	Variabel Independen: <i>Good Corporate Governance</i> , Profitabilitas	<i>Good corporate governance</i> tidak memberikan pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

		Penjualan terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2020)	Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas dan pertumbuhan penjualan memberikan pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> Secara simultan, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan memberikan pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> Sedangkan, <i>good corporate governance</i> secara simultan tidak memberikan pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.
11.	(Muntahana h & Murdijaning sih, 2020)	Peran Tata Kelola Perusahaan dalam Meningkatkan	Variabel Independen: Tata Kelola Perusahaan	Tata kelola perusahaan yang dilihat dari kepemilikan

		Kinerja Perusahaan Pertambangan di Indonesia	(Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Komite Audit) Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan	manajerial dan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan pertambangan Tata kelola perusahaan yang dilihat dari komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan pertambangan.
12.	(Sutisna, 2020)	Pengaruh Penerapan Tata Kelola Perusahaan Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014- 2018	Variabel Independen: Tata Kelola Perusahaan Dan Tanggung Jawab Sosial Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja Keuangan Perusahaan (ROA) Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja Keuangan

		Nana		Perusahaan (ROA) <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja Keuangan Perusahaan (ROA).
13.	(Prayoga & Sumantri, 2023)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Manajerial Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2021) Andreas	Variabel Independen: <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Manajerial Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	<i>leverage</i> secara parsial berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> Profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> Ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

				Kepemilikan manajerial secara parsial tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> <i>leverage</i>, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
14.	(Kartika & Simbolon, 2022)	Pengaruh Komite Audit, Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek	Variabel Independen: Komite Audit, Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Variabel Dependen: Manajemen Laba	Komite audit memiliki nilai sig sebesar 0,000 yang berarti bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba Profitabilitas menunjukkan nilai sig sebesar 0,120



		Indonesia Periode 2016-2020)	yang berarti bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba <i>leverage</i> menunjukkan hasil 0,223 yang berarti bahwa <i>leverage</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba hasil uji anova menunjukkan nilai sig sebesar 0,000 yang berarti komite audit, Profitabilitas dan <i>leverage</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba.
--	--	------------------------------	--

15.	(Luman & Limajatini, 2023)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Profitabilitas, <i>Corporate Governance</i>, dan <i>Firm Size</i> Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021	Variabel Independen : Variabel Dependen : Variabel Independen : Karakter Eksekutif, Profitabilitas, <i>Corporate Governance</i>, dan <i>Firm Size</i> Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Variabel Karakter Eksekutif, Profitabilitas, <i>Corporate Governance</i>, Dan <i>Firm Size</i> secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Secara parsial Karakter Eksekutif, Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan <i>Corporate Governance</i>, Dan <i>Firm Size</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
-----	----------------------------	---	---	--

				Penghindaran Pajak.
16.	(Yosika & Samara, 2023)	Pengaruh <i>Net Financing</i> , Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021) Antika	Variabel Independen: <i>Net Financing</i> , Likuiditas dan Profitabilitas Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Secara parsial <i>net financing</i> tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak Likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak Sedangkan berdasarkan uji secara simultan <i>net financing</i> , likuiditas dan profitabilitas memiliki

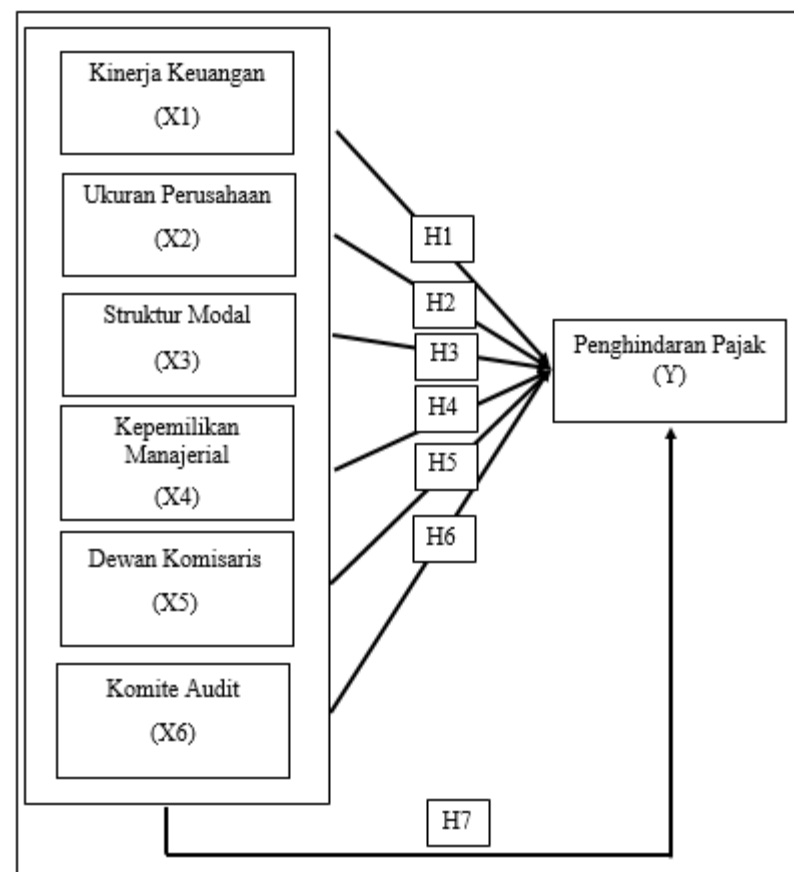
				pengaruh terhadap penghindaran pajak.
17.	(Putriyanti & Maria, 2022)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi	Variabel Independen: Kepemilikan institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris Independen Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Moderasi: Ukuran Perusahaan	kepemilikan institusional dan dewan komisari independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi baik kepemilikan institusional, dewan komisaris independen maupun komite audit terhadap penghindaran pajak.

Sumber: Penelitian terdahulu yang diolah

C. Kerangka Pikiran

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Maka kerangka pikiran yang dibentuk oleh penulis seperti Gambar II.1 sebagai berikut:

Gambar II. 1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Penulis

Keterangan:

Variabel Independen

- X1 : *Return On Asset*
- X2 : *Size*
- X3 : *Debt To Equity Ratio*
- X4 : Kepemilikan Manajerial
- X5 : Dewan Komisaris
- X6 : Komite Audit

Variabel Dependen

- Y : Penghindaran Pajak

D. Perumusan Hipotesis

Pada teori dan kerangka berfikir yang telah dibuat oleh penulis, maka dapat dirumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara atau argumentasi terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan.

1. Pengaruh Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan *Return On Asset* Terhadap Penghindaran pajak

Kinerja keuangan merupakan indikator penting dalam mengukur pencapaian kinerja keuangan. Dalam mengukur kinerja keuangan ini penulis menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA) karena apabila perusahaan memiliki ROA yang tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menggunakan sumber daya atau aset yang dimiliki dengan efektif untuk memperoleh laba. Maka, perusahaan berkinerja baik secara keuangan dan memungkinkan untuk melakukan praktik

penghindaran pajak karena perusahaan mampu menciptakan profitabilitas yang memadai dari operasi normal. Menurut (Widodo & Irwan, 2023) secara parsial kinerja keuangan dengan *Return On Assets* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: diduga Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan *Return On Asset* Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

2. **Pengaruh Ukuran Perusahaan atau *Size* Terhadap Penghindaran pajak**

Ukuran perusahaan atau *size* adalah indikator yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan termasuk besar atau kecil, yang bisa diukur melalui berbagai aspek seperti jumlah modal, total penjualan, jumlah karyawan, total aset, dan faktor lainnya. Perusahaan besar biasanya memiliki jumlah aset yang banyak dan dapat konsisten memperoleh laba dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sehingga perusahaan dengan ukuran besar dapat melakukan praktik penghindaran pajak sehingga dapat mengurangi beban pajak secara optimal. Menurut (Junaldi & Samosir, 2022) ukuran perusahaan secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: diduga Ukuran Perusahaan atau *Size* Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

3. Pengaruh Struktur Modal yang diproksikan dengan *Debt To Equity Ratio* Terhadap Penghindaran pajak

Struktur modal menggambarkan sumber dana jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk melakukan operasional perusahaannya. Dengan menggunakan *Debt To Equity Ratio* (DER) dapat mengukur besarnya utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya. Apabila DER tinggi, perusahaan lebih banyak menggunakan utang terutama utang jangka panjang, dengan utang perusahaan juga dapat melakukan praktik penghindaran pajak karena dapat memanfaatkan pengurangan beban bunga untuk menekan pajak yang harus dibayar, sehingga meningkatkan peluang terjadinya penghindaran pajak. Menurut (Fitri Karina Nindita et al., 2021) struktur modal dengan menggunakan *Debt To Equity Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: diduga Struktur Modal yang diproksikan dengan *Debt To Equity Ratio* Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

4. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang diproksikan dengan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Pada Tata Kelola Perusahaan, kepemilikan manajerial penting dalam penghindaran pajak karena manajer yang memiliki saham di perusahaan cenderung memiliki insentif untuk meningkatkan nilai perusahaan, termasuk melalui strategi penghindaran pajak. Alasannya untuk meningkatkan nilai perusahaan, penyelarasan kepentingan, pengendalian risiko, dan optimalisasi sumber daya. Menurut (Putri & Lawita, 2020) kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: diduga Tata Kelola Perusahaan yang diproksikan dengan Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

5. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang diproksikan dengan Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak

Selain Kepemilikan Manajerial, di dalam Tata Kelola Perusahaan terdapat Dewan Komisaris. Dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak dalam perusahaan, karena memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan arahan strategis kepada manajemen, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Menurut (Putri & Lawita, 2020) kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: diduga Tata Kelola Perusahaan yang diproksikan dengan Dewan Komisaris Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

6. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang diproksikan dengan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Selain Kepemilikan Manajerial dan Dewan Komisaris, di dalam Tata Kelola Perusahaan juga terdapat Komite Audit. Komite audit juga memiliki peran penting dalam penghindaran pajak suatu perusahaan. Didalam suatu perusahaan komite audit memiliki tugas untuk mengawasi laporan keuangan, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan, termasuk peraturan perpajakan. Menurut (Iskandar & Chandra, 2024) secara parsial komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: diduga Tata Kelola Perusahaan yang diproksikan dengan Komite Audit Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

7. Pengaruh *Return On Asset*, *Size*, *Debt To Equity Ratio*, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Komite Audit Terhadap Penghindaran pajak

Jika keseluruhan variabel independen *return on asset*, *size*, *debt to equity ratio*, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit perusahaan berpengaruh terhadap variabel dependen penghindaran pajak. Maka berdasarkan uraian dan penelitian yang ada dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7: diduga *Return On Asset*, *Size*, *Debt To Equity Ratio*, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Komite Audit Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut (Ali et al., 2022) Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur secara statistik atau cara lainnya dari suatu pengukuran. Penulis menggunakan penelitian kuantitatif karena data yang digunakan dalam bentuk angka – angka sebagai alat untuk menganalisis yang datanya diperoleh dari laporan keuangan maupun laporan tahunan perusahaan yang telah diaudit yang menjadi objek penelitian ini. Sumber pengambilan data pada penelitian ini berasal dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023.

B. Objek Penelitian

Pada penelitian ini objeknya perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023. Bersumber pada data laporan keuangan maupun laporan tahunan perusahaan yang telah dilakukan pemeriksaan berkala melalui *website* resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang dipilih merupakan jenis data sekunder yang kemudian dengan sengaja dikumpulkan dan dijadikan sebagai bahan referensi penelitian, selain itu juga datanya akan dicermati dan dipahami oleh peneliti.

2. Sumber Data

Data penelitian yang digunakan sumbernya dari laporan keuangan maupun laporan tahunan yang telah dibuat oleh perusahaan setiap tahunnya. Data laporan keuangan tersebut diperoleh dari perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023 dengan menggunakan data laporan keuangan maupun laporan keuangan tahunan. Berikut adalah populasi perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tabel III. 1
Daftar Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Sub Sektor
1	ADRO	Adaro Energy Tbk	

2	ARII	Atlas Resources Tbk	Batu Bara
3	BESS	Batulicin Nusantara Maritim Tbk	
4	BOSS	Borneo Olah Sarana Sukses Tbk	
5	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk	
6	BUMI	Bumi Resources Tbk	
7	BYAN	Bayan Resources	
8	DEWA	Darma Henwa Tbk	
9	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk	
10	DSSA	Dian Swastatika Sentosa	
11	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk	
12	GEMS	Golden Energy Mines Tbk	
13	GTBO	Garda Tujuh Buana Tbk	
14	HRUM	Harum Energy Tbk	
15	INDY	Indika Energy Tbk	
16	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk	
17	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk	
18	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk	
19	MYOH	Samindo Resources Tbk	
20	PKPK	Perdana Karya Perkasa Tbk	
21	PTBA	Bukit Asam Tbk	
22	PTRO	Petrosea Tbk	
23	SMMT	Golden Eagle Energy Tbk	
24	SGER	Sumber Global Energy Tbk	
25	TCPI	Transcoal Pasific Tbk	
26	TEBE	Dana Brata Luhur Tbk	
27	TRAM	Trada Alam Minera Tbk	
28	BSML	Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk	
29	KOPI	Mitra Energi Persada Tbk	Minyak Mentah & Gas Bumi
30	APEX	Apexindo Pratama Dura Tbk	
31	AKRA	AKR Corporindo Tbk	
32	ARTI	Ratu Prabu Energi Tbk	
33	BIPI	Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk	
34	ELSA	Elnusa Tbk	
35	ENRG	Energi Mega Persada Tbk	
36	MEDC	Medco Energi Internasional	
37	MITI	Mitra Investindo Tbk	
38	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk	
39	SURE	Super Energy Tbk	
40	MTFN	Capitalinck Invesment Tbk	
41	WOWS	Ginting Jaya Energi Tbk	
42	ANTM	Aneka Tambang Tbk	
43	BRMS	Bumi Resources Minerals Tbk	

44	CITA	Citra Mineral Investindo Tbk	Logam & Mineral
45	DKFT	Central Omega Resources Tbk	
46	IFSH	Ifishdeco Tbk	
47	INCO	Vale Indonesia Tbk	
48	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk	
49	PSAB	J Resources Asia Pasifik Tbk	
50	SMRU	SMW Utama Tbk	
51	TINS	Timah Tbk	
52	ZINC	Kapuas Prima Coal Tbk	
53	CTTH	Citatah Tbk	Tanah & Batu Galian

Sumber: www.invesnesia.com

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian kecil dari populasi atau arti lain bagian dari populasi itu sendiri yang mewakili keseluruhan populasi dengan karakteristik tertentu. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* yang metodenya *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sesuai dengan kriteria tertentu, antara lain:

- 1) Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023
- 2) Perusahaan sektor pertambangan yang menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023
- 3) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode 2021-2023

Tabel III. 2
Proses Pemilihan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023	53
2	Perusahaan sektor pertambangan yang secara tidak teratur mempublikasikan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023	(7)
3	Perusahaan sektor pertambangan yang mengalami kerugian tahun 2021-2023	(12)
	Jumlah Sampel	34
	Data Outlier	(6)
	Periode penelitian (2021 – 2023)	3
	Total Jumlah Sampel Selama Periode Penelitian	84

Sumber: Data Olahan Penulis

Dari data diatas, didapatkan Kesimpulan yang menjadi sampel dari 53 perusahaan selama periode tahun 2021 – 2023 adalah perusahaan 28 perusahaan. Terdapat perusahaan yang tidak masuk dalam kriteria. Berikut adalah sampel perusahaan sektor pertambangan yang memenuhi kriteria:

Tabel III. 3
Daftar Perusahaan yang Dijadikan Sampel

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Sub Sektor
1	BESS	Batulicin Nusantara Maritim Tbk	Batu Bara
2	PTBA	Bukit Asam Tbk	
3	SMMT	Golden Eagle Energy Tbk	
4	SGER	Sumber Global Energy Tbk	
5	TCPI	Transcoal Pasific Tbk	
6	TEBE	Dana Brata Luhur Tbk	
7	KOPI	Mitra Energi Persada Tbk	
8	ADRO	Adaro Energy Tbk	
9	ARII	Atlas Resources Tbk	
10	BUMI	Bumi Resources Tbk	
11	BYAN	Bayan Resources Tbk	

12	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk	
13	GEMS	Golden Energy Mines Tbk	
14	INDY	Indika Energy Tbk	
15	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk	
16	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk	
17	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk	
18	MYOH	Samindo Resources Tbk	
19	PTRO	Petrosea Tbk	
20	AKRA	AKR Corporindo Tbk	Minyak Mentah & Gas Bumi
21	ELS	Elnusa Tbk	
22	MITI	Mitra Investindo Tbk	
23	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk	
24	ANTM	Aneka Tambang Tbk	Logam & Mineral
25	CITA	Citra Mineral Investindo Tbk	
26	IFSH	Ifishdeco Tbk	
27	BRMS	Bumi Resources Minerals Tbk	
28	INCO	Vale Indonesia Tbk	

Sumber: Data Olahan Penulis

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, sebagai berikut:

1. Kepustakaan

Teknik ini merupakan metode pertama yang digunakan untuk pengumpulan data dengan cara mengkaji dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Teknik ini biasanya melibatkan penelaahan buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan sumber – sumber lainnya untuk mendapatkan teori, konsep, atau data pendukung penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan penulis merupakan data laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan tahun 2021 – 2023. Data tersebut diperoleh penulis dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasional variabel penelitian adalah elemen atau komponen yang telah ditentukan oleh peneliti untuk menganalisis dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan, dan pada akhirnya menghasilkan Kesimpulan dari penelitian tersebut (Sahir, 2021, 16).

1. Variabel Dependen

Variabel Dependen atau variabel tidak bebas yang dipengaruhi atau yang menjadi akibatnya. Variabel dependen penelitian ini menggunakan Penghindaran Pajak, karena salah satu bentuk yang dapat meminimalisir beban pajak. Pada penelitian ini menggunakan pengukuran dengan skala rasio. Penelitian ini dapat menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber: (Luman & Limajatini, 2023)

2. Variabel Independen

Variabel Independen atau variabel bebas adalah variabel yang memiliki keterikatan terhadap variabel tidak bebas sehingga hasilnya dapat berpengaruh positif atau negatif. Variabel yang digunakan adalah variabel kinerja keuangan, ukuran perusahaan, struktur modal, dan tata kelola perusahaan.

Dalam penelitian ini variabel kinerja keuangan dapat diukur menggunakan rumus *Return On Asset* (ROA), sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Aktiva}$$

Sumber: (Widodo & Irwan, 2023)

Variabel ukuran perusahaan dapat diukur dengan rumus, sebagai berikut:

$$Size (up) = Ln Total Aset$$

Sumber: (Januwito, 2022)

Variabel struktur modal dapat diukur dengan menggunakan rumus *Debt To Equity Ratio* (DER), sebagai berikut:

$$DER = \frac{Total Utang}{Total Ekuitas}$$

Sumber: (Puspita, 2024)

Variabel tata kelola perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus kepemilikan manajerial, sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham Kepemilikan Manajerial}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$$

Sumber: (Prayoga & Sumantri, 2023)

Variabel tata kelola perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus dewan komisaris, sebagai berikut:

$$PDKI = \frac{\text{Dewan Komisaris Independen}}{\text{Dewan Komisaris}}$$

Sumber: (Putriyanti & Maria, 2022)

Variabel tata kelola perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus komite audit, sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Jumlah Komite Audit}$$

Sumber: (Melissa, 2024)

Tabel III. 4
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Skala
Penghindaran Pajak	<i>Effective Tax Rate (ETR)</i>	Tingkat penghindaran pajak perusahaan diukur melalui perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak.	ETR = Beban Pajak Penghasilan / Laba Sebelum Pajak	Rasio
Kinerja Keuangan	<i>Return On Assets (ROA)</i>	Tingkat profitabilitas perusahaan	ROA = Laba Bersih / Total Aset	Rasio

		yang mencerminkan efisiensi penggunaan aset / aktiva		
Ukuran Perusahaan	Total Aset	Besaran perusahaan yang diukur berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan	$Ln = \text{Total Aset}$	Rasio
Struktur Modal	<i>Debt To Equity Ratio</i> (DER)	Rasio antara total utang dengan total ekuitas yang menunjukkan struktur pendanaan perusahaan	$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$	Rasio
Tata Kelola Perusahaan	Kepemilikan Manajerial	Praktik tata kelola perusahaan yang diterapkan perusahaan untuk meningkatkan	$KM = \frac{\text{Jumlah Saham Kepemilikan Manajerial}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$	Rasio
	Dewan Komisaris	transparansi dan akuntabilitas	$PDKI = \frac{\text{Dewan Komisaris Independen}}{\text{Dewan Komisaris}}$	Rasio
	Komite Audit		$KA = \frac{1}{\sum \text{Jumlah Komite}}$	Rasio

Sumber: Data diolah penulis

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode analisis data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian. Dalam melakukan penelitian ini,

penulis menggunakan alat bantu analisis yaitu SPSS (*Statistical Package For The Social Scene*) versi 25. Penelitian diuji dengan beberapa uji *statistic* yang terdiri dari analisis regresi berganda, analisis statistik deskriptif, pengujian hipotesis klasik, dan pengujian hipotesis.

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, tujuan penelitian ini untuk menilai pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan, struktur modal, dan tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak diantara perusahaan sektor pertambangan tahun 2021 – 2023. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 ROA + \beta_2 SIZE + \beta_3 DER + \beta_4 KM + \beta_5 PDKI + \beta_6 KA + \epsilon$$

Sumber: Data diolah penulis

Keterangan

ETR	: Penghindaran Pajak
α	: Konstanta
ROA	: Kinerja Keuangan (<i>Return On Assets</i>)
Size	: Ukuran Perusahaan
DER	: Struktur Modal (<i>Debt To Equity Ratio</i>)
KM	: Kepemilikan Manajerial
PDKI	: Dewan Komisaris
KA	: Komite Audit

$\beta_{1,2,3,4,5,6}$: Koefisien regresi tiap X

ε : Error

2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis suatu data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tanpa menarik kesimpulan yang bersifat umum. Biasanya, teknik analisis ini memberikan gambaran awal untuk setiap variabel dalam penelitian, dimana setiap variabel dapat dilihat dari nilai rata – rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi dalam penelitian Sugiyono (Sahir, 2021, 37)

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi dalam menganalisis regresi linear berganda yang menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Maka, analisis regresi yang tidak menggunakan metode OLS, seperti regresi logistic atau regresi ordinal, tidak memperlakukan pemenuhan asumsi klasik. Selain itu, tidak semua uji asumsi klasik wajib dilakukan pada analisis regresi linear, contohnya, uji multikolinearitas tidak diterapkan pada regresi linear sederhana, dan uji autokorelasi tidak perlu dilakukan pada data *cross sectional* (Rodliyah, 2021, 90).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel independen dan dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Pada

uji normalitas dengan pengujian kolmogorov smirnov memiliki kriteria (Sahir, 2021, 69), sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka, hipotesis diterima dan data berdistribusi normal
- 2) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka, hipotesis ditolak dan data tidak berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinieritas

Dalam buku (Sahir, 2021, 70) mengemukakan bahwa:

“Uji multikolinieritas adalah pengujian yang tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang tinggi antar variabel bebas. Uji multikolinieritas dapat diuji dengan menggunakan metode *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* (TOL).”

Pada uji multikolinieritas hasil penelitian dibuktikan dengan nilai sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *tolerance* $\leq 0,1$ dan *variance inflation factor* (VIF) ≥ 10 maka terdapat multikolinieritas
- 2) Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan *variance inflation factor* (VIF) < 10 maka tidak terdapat multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Dalam buku (Zahriyah et al., 2021, 89) mengemukakan bahwa:

“Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang memiliki tujuan untuk mendeteksi apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu ketidaksamaan varian residual diantara semua pengamatan dalam model regresi.”

Pada uji heteroskedastisitas kriteria pengujian yang digunakan uji *glejser*, sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka, hipotesis diterima karena datanya tidak ada heteroskedastisitas
- 2) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka, hipotesis ditolak karena data ada heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam buku menurut (Sahir, 2021, 71)

mengemukakan bahwa:

“Uji autokorelasi adalah pengujian yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan pada model regresi.”

Pada uji autokorelasi dengan pengujian *Durbin Watson* memiliki kriteria, sebagai berikut:

- 1) Tidak ada autokorelasi positif jika $0 < d < dL$.
- 2) Tidak ada autokorelasi positif jika $dL < d < dU$
- 3) Tidak ada autokorelasi negatif jika $4 - dL < d < 4$.
- 4) Tidak ada autokorelasi negatif jika $4 - dU < d < dL$.
- 5) Tidak ada autokorelasi positif dan negatif jika $dU < d < 4 - dU$.

4. Uji Hipotesis

Dalam memastikan validitas hipotesis yang telah dibuat oleh penulis dalam Bab II, perlu membuktikan dengan perhitungan. Maka, tahapan untuk pembuktian hipotesis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi disimbolkan dengan R^2 pada dasarnya, mengamati sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Pada uji penelitian ini apabila angka koefisiennya kecil atau mendekati 0 (nol), artinya variabel independen memiliki pengaruh kecil terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila nilai R^2 semakin mendekati 100% maka besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada uji koefisien determinasi rumus yang digunakan, sebagai berikut:

$$K = R^2 \times 100\%$$

Sumber: (Sahir, 2021, 54)

Keterangan:

KP : nilai koefisien determinasi

R^2 : nilai koefisien korelasi

b. Uji Parsial (Uji Statistik T)

Uji parsial atau uji t adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, untuk mengetahui signifikan secara parsial masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen (Sahir, 2021, 53). Pada pengujian ini hipotesis yang digunakan, sebagai berikut:

- 1) Jika $t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ atau nilai signifikan $> 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen

2) Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau nilai signifikan $< 0,05$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen.

c. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji F atau uji simultan adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh secara bersama – sama antar variabel independen terhadap variabel dependen (Sahir, 2021, 53). Pada pengujian ini hipotesis yang digunakan, sebagai berikut:

- 1) Jika $f_{\text{hitung}} < f_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- 2) Jika $f_{\text{hitung}} > f_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima